

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abdussalam, H.R. dan Adri Desasfuryanto, 2013, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, PTIK, Jakarta.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Amend, Karen K. dan Mary S. Ruiz, 2014, *Handwriting Analysis The Complete Basic Book (Dasar-Dasar lengkap Analisa Tulisan Tangan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anwari, Achmad, dan Suardi, 2000, *Penyidik Tulisan dan Tanda Tangan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH FH UMJ) & Total Media, Jakarta.
- Bawengan, Gerson W., 1989, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F dan Djisman Samosir, 1985, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1997, *Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsin, H., 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pangaribuan, Luhut MP., 2009, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Perdanakusuma, Musa, 1984, *Bab-bab tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pramusinto, Susetio, 1984, *Himpunan Karangan Ilmu Forensik Suatu Sumbangan Bagi Wiyata Bhayangkara*, PT. Karya Unipres, Jakarta.
- Prasetyono, Dwi Sunar, 2012, *Bedah Lengkap Grafologi Membaca Kepribadian Orang Lewat Tulisan Tangannya*, Diva Press, Jogjakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- _____, 1999, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Saanin, Hasan Basri Dt. Tan Pariaman, 1993, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeparmono, R., 2011, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

- Soetarna, Hendar, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Subekti, R, 1991, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sudarsono, 1999, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudjono, 1976, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan Kejahatan*, Tribisana Karya, Bandung.
- Supomo, R., 1978, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tresna, R., 1993, *Komentar HIR*, Pradya Paramita, Jakarta.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Het Herziene Indonesich Reglement atau Reglement Indonesia Yang Diperhabarui.*
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek voor indonesie*).
- [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

III. JURNAL, KARYA ILMIAH & INTERNET

Bramanda Wiratama, *et al.*, 2015, *Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik Dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat Dan Tanda Tangan*, Gema-Jurnal [Universitas Islam Batik Surakarta](#).

Elizabeth Nurhaini Butarbutar, 2009, *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*, Mimbar Hukum Journal Volume 21, Nomor 2 Juni 2009, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Joan Vezka Tahapary, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Perdata”, Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20252077-T%2028679-Keabsahan%20tanda-full%20text.pdf>, diakses pada tanggal 25 Maret 2016.

Nanang Sutanto, 2006, “*Pertanggung Jawaban Pidana Pemalsuan Surat Bagi Notaris/PPAT Karena Produk Akta Yang Dibuatnya (studi kasus Perkara Pidana Nomor : 01/PID/B/2001/PN.PWR di Pengadilan Negeri Purworejo)*”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Nusye Kusuma Indah Jayanti, 2005, *“Tanda Tangan Digital Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Yang Terjadi Di Electronic Commerce”*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rini Tri Utami, 2010, *“Kekuatan Pembuktian Akta Di bawah tangan Yang Telah Disahkan (Legalisasi) Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Iqbal Albanna, “Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan”,
[http://www.pn-nunukan.go.id/index.php/profil/tupoksi/80-sample-data-articles/joomla/extensions/modules/demo1/167-peran-Hakim-dalam-penemuan hukum-dan-penciptaan-hukum-dalam-menyelesaikan-perkara-di-pengadilan](http://www.pn-nunukan.go.id/index.php/profil/tupoksi/80-sample-data-articles/joomla/extensions/modules/demo1/167-peran-Hakim-dalam-penemuan-hukum-dan-penciptaan-hukum-dalam-menyelesaikan-perkara-di-pengadilan), diakses pada tanggal 12 Maret 2016.
- Putro Perdana, diposting pada 9 April 2013, “Grafologi, Grafonomi dan Handwriting Forensic”,
<https://putroperdana.wordpress.com/2013/04/09/grafologi-grafonomi-dan-handwriting-forensic/>, diakses pada tanggal 16 April 2016.
- Putro Perdana, diposting pada 5 Januari 2013, “Menganalisa Kebohongan Lewat Tulisan (Bagian I)”,
<https://www.putroperdana.wordpress.com/2013/01/05/grafologi-untuk-lie-detector-part-i/>, diakses pada tanggal 3 April 2016.
- Putro Perdana, diposting pada 18 Oktober 2012, “Tipe-Tipe Pelaku Pemalsuan Tandatangan”,
https://putroperdana.wordpress.com/2012/10/18/smooth_criminal-1/, diakses pada tanggal 3 April 2016.
- Erika M. Karohs, 2003, “How to Tell (Dis) Honesty From Handwriting”, California, <https://putroperdana.wordpress.com/tag/pemalsuan-tanda-tangan>, diakses pada tanggal 3 April 2016.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Keterangan Ahli”,
<http://www.negarahukum.com/hukum/keterangan-ahli.html>, diakses pada tanggal 21 Mei 2016.

Tempo, 26 februari 2005, Metode Grafologi untuk Tes ijin Penggunaan Senjata Api, <https://metro.tempo.co/read/news/2005/02/26/05757106/metode-grafologi-untuk-tes-ijin-penggunaan-senjata-api>, diakses pada tanggal 16 April 2016.

Jimly Asshiddiqie, “Prinsip Pokok Negara Hukum”,
<http://www.jimly.com/pemikiran/view/11>, diakses pada tanggal 21 Mei 2016.

Blog Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, 12 Mei 2010, “Mengenal Lebih Dekat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri”,
<http://wartalabfor.blogspot.co.id/2010/05/mengenal-lebih-dekat-puslabfor.html>, diakses pada tanggal 3 April 2016

Hukum Online.com, 10 November 2003, “Alat Bukti Petunjuk akan Dihilangkan dari KUHAP”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9140/alat-bukti-petunjuk-akan-dihilangkan-dari-kuhap>, diakses pada tanggal 16 April 2016.

Hukum Online.com, 11 November 2013, “Syarat Dan Dasar Hukum Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana”,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52770db2b956d/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 16 April 2016.